

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman antar daerah yang tinggi, keragaman antar daerah tersebut terjadi karena adanya perbedaan karakteristik alam, ekonomi, sosial dan budaya dimana sebaran sumber daya alam serta pertumbuhan pusat perdagangan dan industri hanya terkonsentrasi pada beberapa tempat saja. Hal tersebut membuat pembangunan ekonomi daerah yang memiliki keunggulan pada salah satu bidang menjadi lebih tinggi dari daerah lainya.

Menurut (Suhadak dan Nugroho, 2007) berdasarkan permendagri nomor 13 tahun 2006, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana sebagai hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu di bayarkan kembali. Pendapatan daerah di kelompokkan atas : pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. (Amin, 2019: 46)

Pembangunan yang merupakan upaya pemanfaatan segala potensi yang ada di masing-masing daerah sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut diserahkan langsung pada tiap-tiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pemberian otonomi daerah akan menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan peran nyata dan kemandirian daerah dalam upaya meningkatkan daerah, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Karena itu untuk menunjang kegiatan pembangunan daerah tersebut pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan pendapatan daerah.

Adapun upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu:

- a. Mengupayakan dan meningkatkan pendapatan pemerintah daerah dengan mencari terobosan-terobosan inovatif yang tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat dan pemerintah
- b. Berkaitan dengan penghematan biaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004) adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting bagi pemerintah daerah diharapkan dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah dilimpahkan sekaligus dapat mewujudkan tujuan penyelenggaraan otonomi daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan

masyarakat yang semakin baik dan mengembangkan suatu daerah yang disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi kekhasan di masing-masing daerah. (Amin, 2019)

Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Penduduk suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua, yaitu orang yang tinggal di daerah tersebut dan orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dalam sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. (Bidarti, 2020: 1)

Menurut Halim 2002 dalam (Amin, 2019 :19) dengan mengutip dari IASC *framework* menjelaskan bahwa biaya atau belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar, atau deplasi aset, atau terjadinya hutang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Lebih lanjut, PP. No.24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan, menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan di peroleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Menurut Indra Bastian dan Gatot Soepriyant(2002) Belanja Daerah adalah penurunan manfaat ekonomis masa depan atau jasa potensial selama periode

pelaporan dalam bentuk arus kas keluar, atau konsumsi aktiva ekuitas netto, selain dari yang berhubungan dengan distribusi ke entitas ekonomi itu sendiri. (Amin, 2019: 19)

Untuk mengetahui jumlah penduduk, pendapatan pemerintah daerah dan pengeluaran pemerintah daerah kita dapat melihat data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Berikut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Mengenai data jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah daerah dan pendapatan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2016-2020.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Dan, Pendapatan Pemerintah Terhadap
Pengeluaran Pemerintah Daerah

Tahun	Jumlah penduduk (Jiwa)	Pengeluaran pemerintah daerah (Ribu Rupiah)	Pendapatan pemerintah daerah (Ribu Rupiah)
2016	8160901	4962572330,78	6582780929,68
2017	8266983	6409382404,46	8195968131,80
2018	8391489	7941143670,10	9141371395,10
2019	8497196	9618074513,84	9280742072,45
2020	8467432	9517763493,97	9278520060,06

Sumber: (1) <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>

(2) **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan**

Berdasarkan dilihat dari tabel 1.1. bahwa Jumlah Penduduk mengalami peningkatan dari tahun 2016-2019 sedangkan tahun 2020 mengalami penurunan yaitu sebesar 8467432 jiwa Jumlah Penduduk yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

Penduduk dapat mempengaruhi pendapatan daerah. Dengan meningkatnya jumlah penduduk akan meningkatnya permintaan terhadap barang-barang konsumsi. Hal ini

selanjutnya dapat mendorong peningkatan produksi sehingga akan mengakibatkan adanya perluasan usaha pendirian usaha baru pada sektor produksi. Pendirian usaha baru akan menambah angkatan kerja yang bekerja sehingga pendapatan masyarakat akan cenderung meningkat. Dengan adanya jumlah penduduk pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan daerah (sukirno, 2003, 426) dalam (jurnal ilmiah Universitas Batanghari jambi vol. No.8 No.2 juli tahun 2008)

Sedangkan pengeluaran pemerintah daerah dilihat dari tabel diatas mengalami peningkatan dari tahun 2016-2019 sedangkan di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 9517763493,97 ribu rupiah Pengeluaran Pemerintah Daerah dalam data Belanja Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

Studi tentang pengaruh pendapatan daerah (*local own source revenue*) terhadap pengeluaran daerah sudah banyak dilakukan. (Aziz: 2000), menyatakan dalam hipotesis penelitian bahwa penerimaan daerah (terutama pajak) akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah dikenal dengan nama *tax spend hypothesis*. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan penerimaan pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran pemerintah daerah. Dalam (jurnal Andri Devita: Arman Delis:Junaidi perspektif pembiayaan dan pembangunan daerah vol.2 no.2, oktober-desember 2014)

Namun, teori-teori di atas tidak selalu searah dengan data-data yang ada, dapat dilihat dari tabel 1. Ketika dari tahun 2016 menuju tahun 2019 jumlah penduduk

mengalami kenaikan menjadi 84977196 jiwa. Kemudian di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 8467432 jiwa, dari pengeluaran pemerintah juga mengalami peningkatan dari tahun 2016-2019 menjadi 9618074513,84 ribu rupiah. Kemudian di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 9517763493,97 ribu rupiah. Begitupun juga pendapatan pemerintah daerah mengalami peningkatan dari tahun 2016-2019 menjadi 9280742072,45 ribu rupiah sedangkan di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 9278520060,06 ribu rupiah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pendapatan Pemerintah Daerah terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupataen/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2016-2020”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas permasalahan dalam penelitian ini yakni: Apakah ada Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2016-2020 baik secara simultan maupun parsial?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah: untuk mengetahui Pengaruh Jumlah Penduduk dan pengeluarn Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2016-2020 baik secara simultan maupun parsial

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan menambah pengetahuan mengenai tentang Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Pemerintah Daerah di Beberapa Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat di gunakan sebagai bahan masukan dan dapat di aplikasikan ke pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2016-2020